
PERAN PERANCANGAN DALAM MEMPERJUANGKAN RIGHT TO THE CITY PADA KOTA BOGOTA

Zufar Azka Prabaswara

Program Studi Arsitektur
Institut Teknologi Bandung
zufarazka7@gmail.com

Nava Ivana Cindy Tricia Deena

Hutagaol
Program Studi Arsitektur
Institut Teknologi Bandung
nicindytdh@gmail.com

Dian Okta Viryani

Program Studi Arsitektur
Institut Teknologi Bandung
dianoktvr@gmail.com

Agus S. Ekomadyo

Program Studi Arsitektur
Institut Teknologi Bandung
aekomadyo00@gmail.com

Vanessa Susanto

Program Studi Arsitektur
Institut Teknologi Bandung
vanessa.susanto911@gmail.com

ABSTRAK

Seiring bertambahnya populasi perkotaan, timbul isu ketidaksetaraan kesempatan berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari perkembangan kota, yang menyebabkan kota tersegregasi berdasarkan status sosial ekonom masyarakat. Fenomena ini mendorong Henri Lefebvre, mengungkapkan konsep "*right to the city*", dimana seluruh masyarakat pada dasarnya berhak atas ruang kota. Bogota, adalah salah satu kota yang dianggap sukses memperjuangkan *right to the city* lewat gerakan "Bogota Change". Dalam gerakan ini, terdapat sebuah rencana besar Plan Centro, dimana pemerintah berupaya memperbaiki kondisi pusat kota yang terdegradasi dengan membangun ruang publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Bogota memperjuangkan *right to the city* melalui tiga proyek ruang publik yang merupakan bagian dari Plan Centro, yakni Jimenez Quesada Avenue, Taman Tercer Milenio, dan Plaza San Victorino. Ketiga ruang publik tersebut berdampak besar dalam perwujudan kesetaraan sosio-spasial di Kota Bogota melalui upaya pencapaian 6 dari 22 Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial. Pada hasil temuan, terlihat berbagai strategi seperti peningkatan pengawasan, menciptakan ruang hijau, penyediaan transportasi umum dan fasilitas rekreasi, serta menyediakan ruang untuk pembangunan ekonomi sebagai pemenuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia atas ruang. Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merancang kota dalam menunjang hak spasial bagi rakyat.

KATA KUNCI: kesetaraan, right to the city, ruang publik, Bogota

PENDAHULUAN

Isu urbanisasi berdampak terhadap kualitas hidup perkotaan. Ide reformasi sosial kota sepanjang sejarahnya mampu mempengaruhi manajemen perkotaan (Felton, 2005). Kepadatan kota memicu kesenjangan sosial (BPS, 2015), akibatnya kota tidak dapat berkembang sehat dan menimbulkan segregasi ruang. Lefebvre (1968) menyebutkan bahwa hak atas kesetaraan pada kehidupan perkotaan penting bagi semua golongan. Pada dasarnya perlu partisipasi masyarakat untuk mengambil hak ruang atas kota.

Kondisi ini terjadi di seluruh dunia. Fenomena yang sama di Bogota, ibu kota Kolombia pada tahun 1990-an, dengan upaya penanggulangan yang dijuluki "Bogota Change". Saat itu terjadi perubahan wajah kota besar-besaran atas respon kondisi sosial-ekonomi yang semakin parah. Fenomena ini berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik dan sosial kota. Pada awal tahun 90-an, Bogota mengalami krisis dan *urban decay*. Kemudian muncul tokoh politik baru yaitu Antanas Mockus dan Peñalosa yang menjadi perintisnya.

Ketika Antanas Mockus terpilih menjadi walikota (1995-1997), fokusnya adalah revolusi mental warga mengurangi kekerasan rumah tangga dan angka pembunuhan. Hasilnya kondisi sosial kota membaik, angka investasi meningkat, sehingga membuka kesempatan bagi pembangunan besar-besaran pada periode selanjutnya.

Pada periode 1998-2000 kepemimpinan beralih kepada Enrique Peñalosa dengan rencana pembangunannya bernama Plan Centro. Plan Centro adalah proyek dengan fokus utama *urban renovation* di pusat Bogota. Kepemimpinannya meningkatkan angka investasi dan pembangunan infrastruktur yang pesat. Selain itu, banyak dibangun fasilitas publik untuk mengurangi kesenjangan sosial akibat perbedaan kemampuan ekonomi serta memudahkan mobilitas (terutama saat *peak hour*). Fasilitas publik yang dibangun antara lain Transmilenio (sistem *Bus Rapid Transit*), jalur sepeda, taman atau plaza kota, perpustakaan, dan perumahan murah.

Masa pemerintahan selanjutnya dipimpin kembali oleh Mockus. Beliau melanjutkan program peninggalan Peñalosa dan bagaimana moral

masyarakat tetap meningkat agar program bisa bertahan dalam jangka panjang.

Plan Centro

Visi dan misi renovasi yang dicanangkan Peñalosa saat itu berfokus pada ruang publik di pusat kota Bogota. Strateginya adalah konsolidasi ruang sejarah, budaya, wisata, pemukiman, administrasi, dan komersial terpenting di Bogotá agar fasilitas di pusat kota dapat menampung pertumbuhan penduduk hingga dua kali lipat, serta mempersiapkan pusat kota sebagai ruang ekonomi yang dapat bersaing secara global. Kebijakan ini termasuk pengintegrasian pusat kota dengan ruang luar, meningkatkan populasi pemukiman, meningkatkan kualitas hidup penduduk, melindungi dan memulihkan warisan budaya, meningkatkan daya saing kawasan, memulihkan citra positif kawasan, dan mendorong renovasi kota. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan struktur perkotaan multifungsi yang menawarkan ruang hunian dan berbagai aktivitas yang menarik serta ruang publik berkualitas tinggi untuk pengunjung dari dalam dan luar negeri.

Salah satu programnya adalah revitalisasi ruang publik yakni Jimenez Avenue, Taman Tercer Milenio, dan Plaza San Victorino yang menjadi titik awal dalam mewujudkan citra kehidupan urban yang baik di tengah kota. Selain itu, *master plan* dari pembuatan ketiga ruang publik ini juga ditujukan untuk mengembangkan keadaan budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan, dan administratif kota Bogota (Tixier dkk, 2010).

Right to the City

Dalam kapitalisme, ruang bersama di kawasan urban (*urban common space*) dijadikan komoditas untuk kepentingan produksi dan reproduksi kapital. Ruang-ruang ini mencakup jalan, alun-alun, bangunan publik, perumahan, yang bila digabung akan menghasilkan urbanisasi yang spesifik (Harvey, 2005). Sepanjang sejarah, kapitalisme telah membentuk kota sesuai dengan kebutuhan menghasilkan *surplus value* (Harvey, 2012). Alokasi ruang oleh kapital memberikan dampak buruk terhadap keadaan sosial (segregasi sosial), lingkungan (hegemoni kendaraan bermotor), dan politik (efek dari suburbanisasi) pada kota (Santos Junior, 2014). Akibatnya, kota tidak lagi menjadi milik publik, namun dimanfaatkan untuk akumulasi kapital. Selaras dengan nilai ekonomi budaya khususnya dalam ekonomi baru kota, mode kekuasaan dan nilai sering disembunyikan dan disalahpahami, membentuk hierarki simbolik inklusi dan eksklusi (Featherstone, 1997).

Sebagai respon terhadap persoalan ini, muncul gagasan *right to the city*. Gagasan ini memiliki dua bentuk terjemahan dari konsepsi Lefebvre, yaitu *cry* dan *demand*. *Cry and demand* adalah tuntutan untuk

mewadahi reproduksi sosial dalam kota yang meliputi perjuangan hak mengenai perumahan, sanitasi, mobilitas, edukasi, kesehatan, dan seterusnya, serta rencana untuk mengadakan berbagai pergolakan sosial. Dalam memperjuangkan tuntutan ini, muncul gagasan *right to the city* untuk meminimalisir marginalisasi pada perkotaan, merekonstruksi kota untuk mewujudkan keadilan sosial dan kebahagiaan (Brenner dkk, 2012).

Lefebvre mengkategorikan dua hak untuk mencapai *right to the city*, yaitu *right to oeuvre* yang mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan kota, dan *right to appropriation* yaitu hak untuk menggunakan semua ruang di dalam kota untuk kehidupan sehari-hari, meliputi hak menempati, hidup, bermain, bekerja dan terwakili di kota (Lefebvre, 1967). Dalam mengidentifikasi keterlaksanaan kedua hak tersebut, digunakan dokumen legal seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *World Charter for the Right to the City* dan *European Declaration of Urban Rights* yang terdiri dari 22 norma, yang disebut Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial (Sadri, 2019).

Kaitan Konsep Right to the City dengan Bogota

Bila diamati dari berbagai media, gubernur Bogota saat itu menggunakan pendekatan yang humanis dalam melakukan perubahan radikal pada kota dengan memberi penekanan pada kesetaraan sosio-spasial melalui hak akses, sirkulasi, dan penyediaan *urban common space*. Proses perancangan merupakan tindakan kolektif yang digambarkan dengan mengungkap hubungan subjek dan objek teknis, untuk membuat aktor lain melakukan sesuatu (Ekomadyo & Riyadi 2020). Hal ini dikarenakan ruang publik merupakan sesuatu yang esensial dalam kota-kota Amerika Latin. Masyarakat meyakini ruang publik sebagai *punto de encuentro* (titik pertemuan) yang diperlukan untuk demokrasi. Ruang publik Bogota dianggap sebagai ruang 'tanpa kelas', tidak memiliki *estratos* (divisi sosial-ekonomi) dan setiap investasi yang dilakukan di dalamnya dikhususkan bagi kepentingan kota (Castro, 2003). Ruang publik, khususnya taman, dijadikan instrumen penyediaan akses yang adil untuk aktivitas rekreasi dan wadah interaksi masyarakat dari berbagai latar belakang (Berney, 2010).

Pendekatan humanis melalui proyek-proyek yang dicanangkan para walikota Bogota mempunyai kaitan erat dengan konsep *right to the city* (Berney, 2010). Oleh karena itu, dilakukan telaah lebih lanjut untuk mengidentifikasi keterlaksanaan gagasan *right to the city* pada ruang publik di kota Bogota.

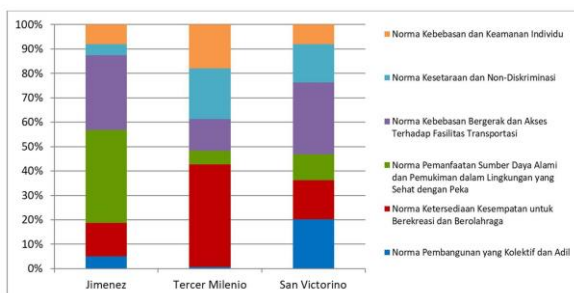
METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menghimpun data-data sekunder dari berbagai jurnal dan ulasan dari internet. Dilakukan penghimpunan data mengenai proses, produk, dan dampak dari tiga ruang publik yang merupakan hasil dari program Plan Centro, yakni Jimenez Avenue, Taman Tercer Milenio, dan Plaza San Victorino. Kuantifikasi data menggunakan data dari ulasan, dikarenakan pengguna sebagai penduduk kota memegang peran penting dalam tercapainya *right to the city* pada ruang publik.

Data-data mengenai ketiga ruang publik tersebut kemudian dipetakan ke dalam 22 Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial. Data tersebut dikerucutkan menjadi 6 norma yang direalisasikan pada ketiga ruang publik. Norma-norma tersebut yakni Kebebasan dan Keamanan Individu (*Freedom and Safety of Person*), Kesetaraan dan Nondiskriminasi (*Equality and Non-Discrimination*), Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi (*Freedom to Move and Access to Transportation Facilities*), Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka (*Conscious Appropriation of Natural Resources and Habitation in Healthy Environment*), Ketersediaan Kesempatan untuk Berekreasi dan Berolahraga (*Availability of Leisure and Sport Opportunities*), dan Pembangunan yang Kolektif dan Adil (*Collective and Fair Development*). Setelah itu, dilakukan kuantifikasi terhadap deskripsi yang relevan pada setiap norma untuk menentukan yang paling dominan pada tiap ruang publik.

HASIL

Tabel 1. Kuantifikasi Kata dan Frase



Jimenez Avenue

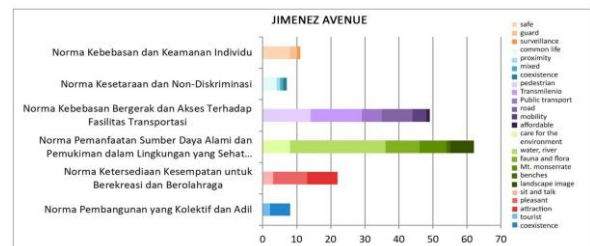


Gambar 1. Peta Jimenez Avenue (kiri); Jalan Jimenez sebelum revitalisasi (kanan)

(sumber: Google Maps; Magazin Dominical El Espectador)

Jimenez Avenue adalah ruang publik yang membentang dari kaki Gunung Monserrate sampai Plaza San Victorino (gambar 1). Jalanan ini dulunya adalah sungai San Fransisco yang ditutupi beton pada tahun 1938 karena sudah tercemar. Sebelum dilakukan revitalisasi, jalan ini dibuat untuk akomodasi kendaraan bermotor yang jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya (gambar 1). Seiring waktu, jalan semakin padat dan menimbulkan banyak polusi. Keberadaan PKL yang semakin tidak tertata tiap harinya dan keamanan yang rendah, memunculkan gagasan proyek yang ambisius, yaitu *Environmental Axis*. Pada tahun 1999, dimulailah proyek pemulihan ruang publik di Jimenez Avenue untuk mengembalikan identitas jalansebagai *axis* kota yang penting, dan meningkatkan daya saing area ini terutama pada sektor pariwisata dan bisnis. Perubahan yang dibuat antara lain pembuatan jalur Transmilenio dan jalur pedestrian, pembuatan ruang terbuka hijau, dan penambahan furnitur taman seperti kolam dan tempat duduk (gambar 2).

Tabel 2. Hasil Kuantifikasi Jimenez Avenue



Setelah melakukan kuantifikasi data, diperoleh bahwa norma yang diwujudkan pada revitalisasi jalan Jimenez ialah Kebebasan dan Keamanan Individu dengan jumlah 11 kata. Selain itu, terdapat norma Kesetaraan dan Nondiskriminasi berjumlah 7 kata. Selanjutnya, norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka dengan total 62 kata, norma Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi dengan 49 kata, norma Berekreasi dan Berolahraga dengan 22 kata, dan norma Pembangunan yang Kolektif dan Adil dengan 8 kata (tabel 2).

Dari hasil olahan kuantifikasi data, didapatkan bahwa norma yang paling menonjol adalah norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka dengan total 62 kata. Hal ini ditunjukkan dari integrasi makna simbolis sungai San Fransisco, pemanfaatan gunung Montserrate, dan penggabungan flora lokal dalam ruang publik. Hal ini ditunjukkan dengan frasa dan kata-kata seperti *trees, water, river, dan Monserrate Mountain* pada ulasan.



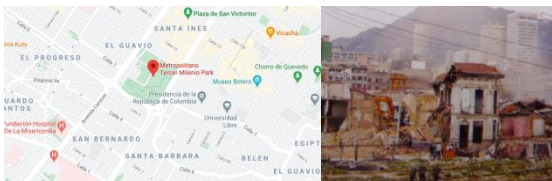
Gambar 2. Pemandangan Gunung Monserrate (kiri); Ruang Hijau untuk Relaksasi (kanan)
(sumber: Google Maps)



Gambar 4. Foto udara Taman Tercer Milenio; Suasana Taman Tercer Milenio
(sumber: Google Maps)

Namun, setiap perancangan pasti akan menghadapi kendala. Walaupun norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan adalah norma yang paling dominan, terdapat kendala seperti perawatan pada 32 kolam yang membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Selain itu, terdapat getaran pada jalan yang dihasilkan oleh sirkulasi Bus Transmilenio. Getaran ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Namun, jalur Transmilenio telah diperbaharui untuk mengatasi kendala ini.

Taman Tercer Milenio



Gambar 3. Peta Lokasi Taman Tercer Milenio (kiri); Penghancuran El Cartucho (kanan).
(sumber: Google Maps; Tixier dkk, 2010)

Tercer Milenio terletak di salah satu distrik tertua di Bogota, yaitu Santa Ines (gambar 3). Lokasi ini hanya berjarak 2 blok dari istana kepresidenan. Sebelum menjadi taman, kawasan ini terkenal sebagai distrik kumuh dan berbahaya, dengan sebutan El Cartucho (gambar 3). Kawasan tersebut dikenal sebagai lokasi penyebaran dan konsumsi narkoba di Kota Bogota. Pembangunan taman Tercer Milenio melibatkan penghancuran kawasan El Cartucho seluas 20 hektar, pemindahan 3030 keluarga dan 1620 perusahaan komersial, serta dislokasi 2000 orang yang tidak tercatat dalam sensus penduduk. Akibatnya, pembangunan taman ini awalnya menjadi kontroversial, namun seiring berjalannya waktu proyek ini didukung media dan publik. Kini, taman Tercer Milenio dianggap sebagai pusat kota dan menjadi kunci pemulihan Kota Bogota. Taman ini membuka kesempatan untuk meningkatkan daya saing Bogota di kancah internasional dan memperbaiki kualitas hidup, karena memicu pembangunan retail dan fasilitas umum di sekitar taman.

Tabel 3. Hasil Kuantifikasi Tercer Milenio



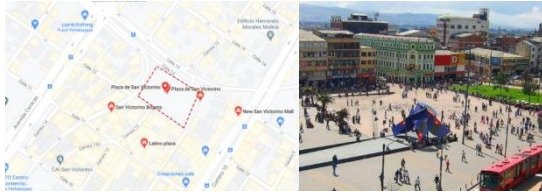
Merujuk pada kuantifikasi kata dan frase dalam ulasan *online* dan hasil wawancara Tixier dkk (2010), norma Kebebasan dan Keamanan Individu diulas para pengunjung sebanyak 143 kali. Norma Kesetaraan dan Nondiskriminasi dibahas sebanyak 163 kali. Selanjutnya, norma Kebebasan Bergerak dan Akses terhadap Fasilitas Transportasi diulas sebanyak 104 kali. Selain itu, norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka diulas sebanyak 44 kali. Selanjutnya, norma Ketersediaan Kesempatan untuk Berekreasi dan Berolahraga diulas sebanyak 336 kali. Terakhir, norma Pembangunan yang Kolektif dan Adil diulas sebanyak 6 kali (tabel 3).

Dari pengolahan data ulasan dan hasil wawancara diatas, didapatkan bahwa Taman Tercer Milenio berdampak paling besar pada norma Ketersediaan Kesempatan untuk Berekreasi dan Berolahraga (diulas sebanyak 336 kali). Ulasan dan hasil wawancara mendeskripsikan fasilitas rekreasi dan olahraga yang tersedia serta pengalaman narasumber saat berekreasi atau berolahraga di Taman Tercer Milenio. Kata-kata yang paling sering muncul antara lain *sports/olahraga* (26), *games/permainan* (17), *exercise/latihan* (16), *gym* (15), *soccer/sepak bola* (14), dan *fun/menyenangkan* (13).

Secara keseluruhan, taman ini dianggap sukses dalam mengembalikan hak masyarakat akan ruang publik Bogota. Namun, pandangan tentang dampak taman ini pada kehidupan masyarakat masih beragam. Taman ini memberi banyak keuntungan bagi kondisi sosial dan ekonomi kota secara keseluruhan: meningkatkan keamanan kawasan, daya saing ekonomi, dan citra kota. Di sisi lain, pembangunan taman ini juga merugikan bagi sebagian penghuni kawasan sebelumnya yang terdislokasi. Beberapa

narasumber dalam wawancara Tixier dkk.(2010) mengaku kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat penghancuran kawasan El Cartucho tanpa mendapat kompensasi yang sepadan.

Plaza San Victorino



Gambar 5. Peta Lokasi Plaza San Victorino (kiri); Kondisi Plaza Kini (kanan)

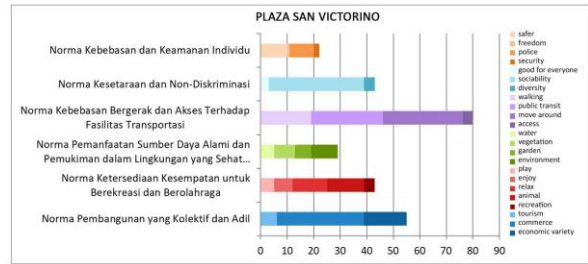
(sumber : Google Maps; Tixier dkk, 2010)

Plaza San Victorino terletak di pusat kota Bogota, sejak dulu merupakan kawasan padat yang ditempati oleh pedagang kaki lima dan toko pernak pernik. San Victorino ditempati pasar semi permanen kumuh hingga dikategorikan sebagai zona berbahaya, sebagai dampak dari keputusan pemerintah menghilangkan pedagang informal di titik-titik pusat kota. Kawasan ini menjadi fokus Plan Metro akhir 1990-an yang bertujuan untuk memulihkan pusat kota dengan menyediakan ruang publik, transportasi, dan infrastruktur perkotaan yang lebih baik. Proyek ini menyediakan ruang publik berskala besar pertama yang dirancang oleh Taller del Espacio Publico, di bawah arahan arsitek Kolombia Lorenzo Castro. Hasil renovasi membentuk plaza terbuka sebagai ruang publik milik semua warga negara, tidak hanya untuk vendor yang menempatnya. Oleh karena itu, pemulihan ruang mengakibatkan penggusuran dan relokasi semua pedagang informal dan penghancuran Galerias Narino untuk memberikan ruang bagi pejalan kaki menikmati area komersial (gambar 6).



Gambar 6. Transformasi Plaza San Victorino (Sumber : Cabrera, 2014)

Tabel 4. Hasil Kuantifikasi Plaza San Victorino



Melalui kuantifikasi data, diperoleh bahwa norma-norma yang dicapai oleh pembentukan plaza San Victorino merupakan norma Kebebasan dan Keamanan Individu dengan jumlah 22 kata. Norma Kesetaraan dan Nondiskriminasi berjumlah 44 kata. Selanjutnya, terdapat norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan total 29 kata, norma Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi dengan 80 kata, norma Berekreasi dan Berolahraga dengan 43 kata, dan norma Pembangunan yang Kolektif dan Adil dengan 55 kata (tabel 4).

Dari hasil kuantifikasi data, didapat bahwa norma yang paling dominan adalah norma Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi. Hal ini direalisasikan dari hasil rancangan yang berupa plaza terbuka terletak strategis di pusat kota. Titik ini terintegrasi dengan sistem transportasi umum pemerintah Transmilenio, dan terhubung menjadi transisi dengan Avenida Jimenez dan Tercer Milenio. Respon perancang khusus membagi sirkulasi kendaraan hanya boleh di sisi tertentu, selain itu hanya boleh diakses oleh pedestrian. Dengan bentuk yang luar biasa sederhana, arsitek membagi plaza menjadi tiga sektor dengan batas-batas material dan fasilitas yang berbeda. Penataan ruang ini berhasil merespon sirkulasi pejalan kaki dan kondisi lingkungan setempat.

Meskipun demikian, ditemukan beberapa aspek yang masih belum terselesaikan misalkan pada pemeliharaan fasilitas publik di San Victorino kurang terjaga dan merusak citra pengunjung. Selain itu, ketertiban pedagang informal yang berjualan dan gelandangan terkadang tidak terkontrol dan sangat ramai. Kriminalitas masih banyak ditemukan dengan laporan seperti pencurian dan pencopetan. Masyarakat bersama pemerintah harus tetap berpartisipasi aktif untuk mewujudkan keamanan dengan saling waspada.

DISKUSI

Kebebasan dan Keamanan Individu

Merujuk pada *Universal Declaration of Human Rights* pasal 3, Kebebasan dan Keamanan Individu

didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk hidup, mendapat kebebasan, dan mendapat keamanan. Sebelum mengalami perubahan, Bogota dikenal dengan kotadengan keamanan rendah. Dengan eksistensi ruang publik tersebut, keamanan menjadi meningkat dan publik dapat memanfaatkan ruang tersebut dan terkait dengan teori Lefebvre (1967) yaitu *right to appropriation, use value* daerah tersebut pun meningkat. Pemanfaatan ketiga ruang publik tersebut meningkat karena daerah yang makin aman.

Norma Kebebasan dan Keamanan Individu yang diwujudkan pada kasus Jimenez Avenue adalah jalur kendaraan sepi dan rawan kriminalitas yang diubah menjadi jalur khusus pedestrian dan Transmilenio, sehingga jalanan ini menjadi ramai dan banyak *surveillance* publik. Pada kasus taman Tercer Milenio, diwujudkan melalui transformasi kawasan kumuh dan berbahaya El Cartucho menjadi taman yang luas, terbuka, dan mudah diawasi pengunjung maupun aparat keamanan, sehingga stigma “bahaya” pada kawasan tersebut perlahan-lahan hilang. Di Plaza San Victorino, terjadi perubahan stigma buruk masyarakat Bogota sebagai pasar informal kumuh menjadi ruang publik yang mengundang pengunjung berkumpul. Kehadiran manusia di jalan memberikan jaminan lebih pada keamanan pengunjung ditambah pengawasan petugas keamanan. Hal ini menunjukkan, bahwa jika dirancang dengan baik pasar bisa menjadi tempat berkembangnya aktivitas sosial budaya perkotaan, bahkan mampu memberikan karakter festival (Ekoadyo, 2019, Maulana dan Ekoadyo, 2015). Seperti ruang sosial lainnya, ini adalah tempat di mana aktor memiliki kendali atas sumber daya dengan mengubah modal ekonomi dan non-ekonomi (budaya, sosial dan simbolik) menjadi tindakan strategis (Bourdieu, 1986; Dovey, 2010).



Gambar 7. Petugas Keamanan di Jimenez Avenue (atas); Taman Tercer Milenio yang luas dan terbuka mudah diawasi aparat keamanan (kiri); San Victorino diawasi oleh petugas Keamanan (kanan)
(sumber: Tixier dkk., 2010; Mike’s Bogota, 2014)

Dari ketiga kasus tersebut, keamanan dicapai dengan meningkatkan pengawasan, baik melalui pantauan dari petugas keamanan, maupun *surveillance* dari pengguna ruang publik (gambar 7). Strategi arsitektur dilakukan dengan membuat ruang publik yang luas dan didominasi oleh *void* untuk jarak dan luas pandangannya yang besar.

Kesetaraan dan Nondiskriminasi

Definisi Norma Kesetaraan dan Nondiskriminasi merujuk pada Universal Declaration of Human Rights, yaitu hak yang sama di antara semua manusia saat ia dilahirkan dan ia diberkahi dengan akal dan hati nurani sehingga harus menjunjung persaudaraan, serta hak untuk mendapat kebebasan tanpa melihat perbedaan ras, gender, bahasa, agama, politik, kenegaraan, atau status sosial. Bila dikaitkan dengan teori Lefebvre (1967), hak ini merupakan *right to appropriation*, hak untuk mengakses ruang publik.

Pada kasus Jimenez Avenue, norma Kesetaraan dan Nondiskriminasi berhubungan dengan norma Kebebasan dan Keamanan Individu. Setelah alih fungsi jalan dari sekadar jalan mobil, semua orang dapat menikmati ruang publik ini dengan aman. Pada Taman Tercer Milenio, norma ini terwujud melalui peremajaan kawasan yang identik dengan kemiskinan dan kriminalitas menjadi ruang publik yang inklusif bagi warga kota. Sedangkan, pada San Victorino menunjukkan kawasan yang menerima semua kalangan masyarakat, tidak hanya bagi pedagang informal yang sebelumnya menempati zona ini (gambar 8). Nilai ini didukung atas kesadaran masyarakat mewujudkan tingkat sosial yang tinggi melalui interaksi tanpa melihat perbedaan.



Gambar 8. Kondisi plaza San Victorino yang dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan
(sumber: Radio Nacional de Colombia)

Norma Kesetaraan dan Non-diskriminasi pada ketiga kasus ini terlihat pada akses ruang publik yang nyaman yang dapat terbuka bagi semua kalangan. Peremajaan ruang publik ini ditujukan untuk kenyamanan pengguna dalam menggunakan ruang tanpa melihat kelas sosial/ekonomi, umur, maupun pekerjaan.

Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka

Norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka yang diwujudkan pada ketiga ruang publik ini merupakan implementasi dari pasal 16 di dokumen *World Charter for the Right to the City*, yaitu pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, ekspansi ruang hijau, menghormati alam dan meningkatkan kualitas fasilitas kota. Pelaksanaannya pada ketiga ruang publik ini menunjukkan *use value* yang dapat dinikmati masyarakat sekitar.

Pada kasus Jimenez Avenue, norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka termanifestasi pada pembuatan 32 kolam sebagai makna kehadiran kembali sungai San Fransisco secara simbolis (gambar 9), dan penghormatan terhadap gunung Montserrat dengan rancangan jalan yang tidak menghalangi pemandangan menuju gunung. Selain itu, juga terdapat penambahan berbagai flora lokal dan pohon peneduh. Berbagai pertimbangan ini penting diwujudkan karena sebelumnya, jalan ini dipenuhi oleh polusi karena sirkulasi lalu lintas yang padat. Pada Tercer Milenionorma ini diwujudkan dengan besarnya lahan yang digunakan penghijauan, yang juga sering digunakan pengunjung untuk duduk santai, piknik, dan bermain-main.

Plaza San Victorino menyediakan sektor khusus pada kawasan yang terdiri atas taman hijau dengan beberapa pohon palem yang disertai bangku-bangku taman. Di sisi lain sektor, terdapat sedikit pohon sebagai peneduh.



Gambar 9. Persebaran kolam pada *Environmental Axis*;

(sumber: Diego Andrés Rojas Coronado)



Gambar 10. Taman Tercer Milenio menyediakan penghijauan yang melimpah (kiri); Sektor taman dan vegetasi pada plaza San Victorino (kanan)

(sumber: Tixier dkk., 2010; Google Maps, 2020)

Ketiga ruang publik tersebut memenuhi norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka dengan pengadaan ruang terbuka hijau seperti taman, ruang biru seperti sungai atau kolam, maupun penanaman vegetasi di beberapa titik (gambar 10). Desain kawasan juga mempertahankan pemandangan alam seperti gunung Montserrat.

Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi

Norma Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi pada ketiga kasus merujuk pada pasal 13 di dokumen *World Charter for the Right to the City*, yaitu hak mobilitas yang sesuai rencana sirkulasi dalam kota dan antar kota, disediakan dengan biaya yang terjangkau untuk berbagai kebutuhan lingkungan dan sosial (jenis kelamin, usia, kebutuhan penyandang disabilitas dll.). Selain itu, kota harus merangsang penggunaan kendaraan non-polusi dan memberikan ruang untuk sirkulasi pejalan kaki, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam sistem mobilitas. Dengan memperjuangkan hak ini, masyarakat umum mendapat *right to appropriation* secara tidak langsung, yaitu kemudahan akses untuk mendukung kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti menuju tempat bekerja dan mencapai aktivitas rekreasi.

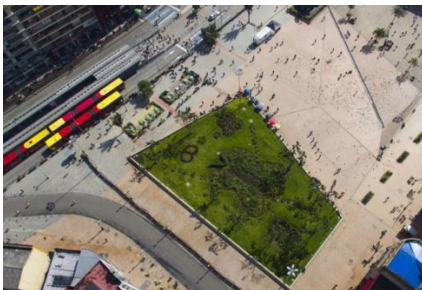
Tidak seperti kondisi jalan Jimenez yang dulunya memprioritaskan sirkulasi mobil, keadaan jalan Jimenez sekarang menunjukkan norma Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi dengan penyediaan jalur pejalan kaki yang mendominasi jalan (gambar 11) dan dilengkapi dengan furnitur taman untuk beristirahat sejenak, dan pengadaan jalur Transmilenio dengan tarif yang terjangkau dengan halte dan bus yang dapat mengakomodasi penyandang disabilitas. Pada gambar 12 menjelaskan Taman Tercer Milenio menyediakan transportasi Transmilenio dan jalur sirkulasi pejalan kaki yang luas, sehingga permeabilitas kawasan meningkat. Peningkatan permeabilitas dapat dilihat dari kemudahan pengunjung taman bergerak dari, dalam, dan menuju taman dengan berbagai sarana transportasi, serta banyaknya orang yang melewati taman untuk menuju lokasi lain. Di Plaza San Victorino pejalan kaki memiliki akses dari segala arah, karena sirkulasi kendaraan hanya tersedia di sisi tertentu (gambar 13). Pengunjung bebas bergerak, beraktivitas, ataupun sekedar istirahat duduk-duduk karena geometri plaza yang luas, sangat terbuka, dan sederhana.



Gambar 11. Pengguna menggunakan jalanan sepanjang Jimenez Avenue; (sumber: Google Maps)



Gambar 12. Titik berhenti bus di Taman Tercer Milenio; (sumber: Google Maps)



Gambar 13. Akses sirkulasi San Victorino; (sumber: Google Maps)

Pemenuhan norma Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi ditunjukkan dengan sirkulasi dan *wayfinding* menuju dan dalam tapak yang mudah. Ketiga kasus berlokasi dekat dengan jalur transportasi umum Transmilenio. Pergerakan pedestrian juga sangat fleksibel dan tanpa pembatas. Ruang dan material yang dipakai dirancang untuk pengguna pejalan kaki dan difabel.

Ketersediaan Kesempatan untuk Berekreasi dan Berolahraga

Norma Ketersediaan Kesempatan untuk Berekreasi dan Berolahraga pada ketiga kasus merujuk pada pasal 7 di dokumen *European Declaration of Urban Rights*. Norma ini merupakan penjawaban langsung dari *right to appropriation*, karena menyatakan tentang hak menempati dan mengakses fasilitas olahraga dan rekreasi bagi semua orang, lintas umur, kemampuan, dan pendapatan. Pemanfaatan sarana olahraga, budaya olahraga antar masyarakat dan keterkaitan

dengan lingkungan perkotaan berhubungan langsung dengan kemampuan sarana olahraga yang mumpuni bagi generasi urban (Aman, Omar, & Barghchi, 2009). Pada masa kini, arsitek didesak untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang kontribusi dan peran arsitektur dalam merancang tempat yang lebih sehat dan aman, termasuk fasilitas olah raga. (Susanto & Ekomadyo, 2020)

Pada kasus di Jimenez Avenue, norma Ketersediaan Kesempatan untuk Berekreasi dan Berolahraga direalisasikan pada jalan Jimenez sebagai sarana rekreatif, yaitu tempat untuk bercengkrama, ruang hijau sebagai tempat bersantai, dan *cityscape* di sepanjang jalan Jimenez yang menarik. Selain itu, akses yang mudah untuk mencapai fasilitas rekreatif seperti area historis dan fasilitas komersial (cafe, toko, dan bar yang modis) juga menjadi kontributor dalam pemenuhan norma ini. Norma ini menjadi salah satu upaya untuk meramaikan area ini. Pada Taman Tercer Milenio, norma ini diwujudkan melalui fasilitas olahraga (lintasan jogging, lapangan bola, dan jalur pengendara sepeda dan pejalan kaki) dan elemen-elemen taman yang menunjang kegiatan rekreasi (penghijauan, trotoar yang luas, furnitur taman, dan taman bermain). Suasana tenang dan sejuk dari desain taman ini membuat Tercer Milenio disukai masyarakat kota sebagai tempat untuk berekreasi bersama keluarga di akhir pekan, berolahraga, hingga bersantai sejenak di tengah kesibukan sehari-hari. Pada Plaza San Victorino terdapat aktivitas rekreatif yang terbentuk dari fitur urban dan pemanfaatan ruang yang disesuaikan oleh pengguna. Area tengah alun-alun digunakan sebagai tempat bermain, duduk bersantai di bangku taman, hingga memberi makan burung.



Gambar 14 Fasilitas olahraga di Taman Tercer Milenio (atas); Area rerumputan di Taman Tercer Milenio dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan bermain (kiri); Aktivitas rekreasi di San Victorino seperti bermain burung (kanan)(sumber : Tixier dkk., 2010)

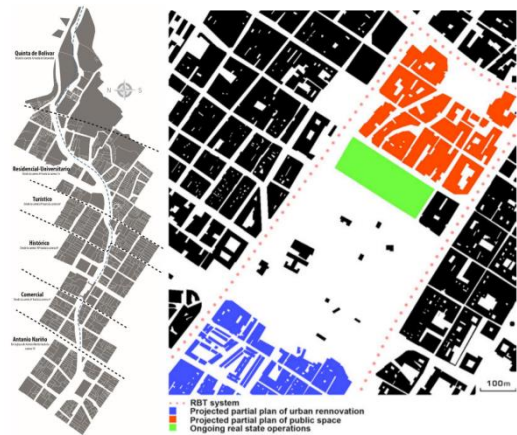
Pada Norma ini, ketiga kasus berhasil menyediakan ruang dengan beberapa fasilitas olahragadan fitur multi fungsi dengan tujuan bersantai dan rekreasi. Fitur maupun fasilitas publik dirancang sebagai penunjang aktivitas warga (gambar 14).

Pembangunan yang Kolektif dan Adil

Norma Pembangunan yang Kolektif dan Adil yang diwujudkan pada ketiga ruang publik ini merupakan implementasi dari pasal 13 dan 14 pada dokumen *European Declaration of Urban Rights*, serta pasal 5 dan 11 pada *World Charter for the Right to the City*. Hal ini mencakup tanggung jawab pemerintah untuk memantik pertumbuhan ekonomi dan mencapai keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Terdapat obligasi untuk pemerintah dalam mengembangkan kota yang ditujukan untuk mencegah segregasi dan eksklusivitas teritorial, dan mendorong produktivitas sosial.

Norma Pembangunan yang Kolektif dan Adil yang diwujudkan di Jimenez Avenue setelah revitalisasi jalan adalah peningkatan jumlah fasilitas yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas (hotel, apartemen kelas atas, dan fasilitas komersial), yang sebelumnya fasilitas yang tersedia hanya untuk kalangan menengah ke bawah (gambar 15). Hal ini ditujukan untuk melipatgandakan jumlah penduduk kota Bogota yang sebelumnya ditinggalkan penduduk menengah ke atas karena tingkat keamanan kota yang rendah. Pembangunan Taman Tercer Milenio sendiri merupakan upaya mewujudkan norma ini, karena transformasi El Cartucho menjadi taman metropolitan awalnya diharapkan meningkatkan minat pengembangan di sekitar taman. Walaupun dalam prosesnya beberapa rakyat kecil justru mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, pembangunan Tercer Milenio masih dipandang sebagai pembangunan yang adil oleh masyarakat kota, karena kebanyakan oknum yang dirugikan adalah para kriminal yang beroperasi di El Cartucho.

Sedangkan, revitalisasi pada San Victorino meningkatkan pembangunan fasilitas komersial pada sekitar kawasan. Pedagang formal dan pedagang kaki lima menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang menjual berbagai macam hal, variatif, ekonomis, namun dengan kualitas unggulan. Ini berdampak pada peningkatan jumlah turis di pusat kota Bogota.



Gambar 15. Zonasi Jimenez Avenue (kiri); Pembangunan yang terjadi di sekitar Taman Tercer Milenio (kanan) (sumber: Diego Rojas Coronado; Tixier dkk., 2010)

Ketiga kasus ruang publik di atas memenuhi norma Pembangunan yang Kolektif dan Adil karena kehadirannya berdampak pada pembangunan ekonomi kawasan sekitarnya (gambar 15). Hal ini merupakan bentuk partisipasi warga untuk datang dan berkontribusi pada pembangunan.

Meskipun upaya revitalisasi yang terjadi di Bogota menunjukkan manfaat, tidak selamanya berbuah positif. Masih terdapat permasalahan yang belum terpecahkan, hingga muncul kontroversi atas dampak yang dihasilkan dari ruang publik yang tidak sesuai dengan tujuan *right to the city*. Beberapa aspek yang telah terakomodasi juga menyisakan permasalahan baru mulai dari gentrifikasi, kehilangan rumah atau pekerjaan akibat penggusuran, perawatan dan pemeliharaan fitur, hingga ketertiban dan kriminalitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat paradoks pada produk rancangan yang tidak sepenuhnya memihak masyarakat dan terdapat keberpihakan kepada kelompok masyarakat tertentu (Berney, 2012).

KESIMPULAN

Transformasi yang terjadi pada kota Bogota tak lepas dari upaya perwujudan Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial pada ruang publik yang direvitalisasi. Pada Norma Kebebasan dan Keamanan Individu dilakukan peningkatan pengawasan. Norma Kesetaraan dan Nondiskriminasi dicapai melalui akses ruang publik yang nyaman dan terbuka bagi semua kalangan. Norma Pemanfaatan Sumber Daya Alami dan Pemukiman dalam Lingkungan yang Sehat dengan Peka ditandai dengan ruang terbuka hijau dan vegetasi di beberapa titik. Pemenuhan norma Kebebasan Bergerak dan Akses Terhadap Fasilitas Transportasi ditunjukkan dengan jalur yang ramah pejalan kaki dan penyediaan transportasi umum Transmilenio. Kemudian, Norma Ketersediaan Kesempatan untuk

Berekreasi dan Berolahragadiwujudkan dengan menyediakan fasilitas olahraga dan ruang multifungsi (bersantai dan beraktivitas fisik). Terakhir, norma Pembangunan yang Kolektif dan Adil terpenuhi karena kehadirannya mendorong pembangunan ekonomi kawasan.

Fenomena “Bogota Change” berkaitan erat dengan konsep *right to the city* karena pendekatannya yang humanis. “Bogota Change” berupaya mengembalikan hak atas kota melalui transformasi ruang kota yang terdegradasi menjadi ruang publik. Perubahan radikal pada Bogota memberikan penekanan kesetaraan sosio-spasial melalui hak akses, sirkulasi, dan penyediaan ruang kota bersama (*urban common space*). Instrumen yang digunakan berupa ruang publik yang adil untuk bersantai, rekreasi, berkumpul, dan wadah interaksi masyarakat berbagai latar belakang (ruang tanpa kelas). Walaupun kasus Bogota Change mengupayakan semangat dalam mencapai *right to the city*, pada praktiknya perancangan kota tetap menghasilkan adanya konflik baru.

Dalam menghadapi permasalahan urbanisasi, Indonesia perlu mewujudkan hak rakyat atas ruang kota. Belajar dari ketiga ruang publik Bogota, kesenjangan sosial dapat dicegah dan/atau ditanggulangi melalui desain ruang publik, dengan mempertimbangkan Norma Hak Asasi Manusia terkait Hak Spasial. Dengan demikian, desain arsitektur bukan sekadar melulu penyelesaian teknis, namun juga sosio-teknis, karena objek-objek teknis sebagai hasil desain akan memberikan dampak kepada masyarakat (Ekomadyo dan Yuliar, 2013, Ekomadyo, dkk, 2014, Ekomadyo dan Riyadi, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Aman, M., Omar, D., & Barghchi, M. (2009). Sports facilities development and urban generation. *Journal of Social Sciences*, 5(4), 460-465.
- Anderson, Nadia M., (2011), Social Infrastructure as a Means to Achieve the Right to the City, *Architecture Conference Proceedings and Presentations*. 18. https://lib.dr.iastate.edu/arch_conf/18
- Berney, R. (2010). Learning from Bogotá: How Municipal Experts Transformed Public Space, *Journal of Urban Design*, 15:4, 539-558.
- Berney, R. (2011). Pedagogical Urbanism: Creating Citizen Space in Bogotá, Colombia. *Planning Theory*. 10(1), 16–34.
- Berney, R. (2012). Public Space Versus Tableau: The Right-to-the-city Paradox in Neoliberal Bogotá, Colombia. *Routledge*.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-58). Westport, USA: Greenwood Publishing Group.
- BPS (2015), Data Sensus Kepadatan Penduduk menurut Provinsi di Indonesia.
- Brenner, N., Marcuse, P., & Mayer, M. (2012). *Cities for people, not for profit: Critical urban theory and the right to the city*. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Cifuentes, Camilo, Nicolas Tixier. (2012). An Inside Look at Bogotá’s Urban Renewal. From Broad Urban Stories to Every Day Tales. *IFOU 6th Conference of International Forum on Urbanism*. IFOU, pp.1-11, <hal-00993660>.
- Cabrera, Maria Camila Coronado (2014). *Understanding Change: Public Space Construction in Bogotá, Colombia The Plaza de San Victorino*. Amerika Serikat: The University of Texas at Austin.
- Coronado, D.A.R. (2017). *Revitalización Sostenible Del Río San Francisco*. Bogotá: Universidad La Gran Colombia.
- Cuéllar, J. M., Budes, C. A., (2015). *El río que corre: Una historia del río San Francisco y la Avenida Jiménez*. Bogotá: Fundación de Amigos de Bogotá.
- Dovey, K. (2010). *Becoming places: Urbanism/architecture/identity/power*. London, England: Routledge.
- Ekomadyo, A.S. (2019). Evaluating Revitalized Public Markets as Economic and Socio-cultural Places in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humaniora* 27(2): 963-976.
- Ekomadyo, A.S., Prasetyo, F.A., dan Yuliar, S., (2013). Place Construction and Urban Social Transformation: an Actor Network Theory Analysis For Creative-Kampung Phenomena in Bandung, HABITechno International Seminar: Innovation Housing and Settlement Technology. Institute of Technology Bandung, November 2013
- Ekomadyo, A.S., dan Yuliar, S. (2014) Social Reassembling as Design Strategies”. 5th Arte Polis International Conference and Workshop – “Reflections on Creativity: Public Engagement and The Making of Place”, Arte-Polis 5, 8-9 August 2014, Bandung, Indonesia. Science Direct - Procedia - Social and Behavioral Sciences 184(2015) 152–160, 1877-0428 © 2015, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.05.075,
- Ekomadyo, A. S. & Riyadi, A. (2020). Design in socio-technical perspective: An actor-network theory reflection on community project ‘Kampung Kreatif’ in Bandung. *Archives of Design Research* 33 19-37

- Featherstone (1997) dalam Robert Drewe, *The Penguin Book of the City*, Penguin, Sydney, 1997, p. 103
- Felton, Emma (2005) 'Getting the city right': the city as crucible for social reform. *Journal of Australian Studies*, 29(85): 127-140.
- Global Infrastructure Hub.(2020). Transmilenio Bus Rapid Transit. <https://inclusiveinfra.github.org/case-studies/transmilenio-bus-rapid-transit-colombia/>
- Harvey, D.A. (2012). *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*. London: Verso.
- HARVEY, D. A. (2005). *Produção Capitalista do Espaço*. São Paulo: Annablume.
- Hernandez, Felipe. (2009). *Beyond Modernist Masters: Contemporary Architecture in Latin America*
- Lefebvre, H. (1967). (italic) *Le droit à la ville. L'Homme et la société*. Paris: Anthropos.
- Loaiza, K., Gaitán, C. El centro histórico de Bogotá: así será su gran transformación. <https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/logros-del-plan-de-gobierno-de-penalosa-en-2017/renovacion-del-centro-de-bogota.html>
- Maulana, A.T, dan Ekomadyo, A.S. (2015). Karakter Festival pada Perancangan Pasar untuk Tengaran Kota. Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia 2015. Universitas Sam Ratulangi Manado, November 2015. ISBN 978-602-73485-0-9. <http://temuil ilmiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2015/11/TI2015-E-067-074-Karakter-Festival-pada-Rancangan-Pasar-di-Kawasan-Bandung-Technopolis.pdf>
- Obras Por Expansión. (2013). Eje Ambiental de Salmona, el sepulcro de un río de Bogotá. <https://obras.expansion.mx/arquitectura/2013/09/16/eje-ambiental-de-salmona-el-sepulcro-de-un-rio-en-bogota>
- Sadri, H. (2019). Architecture and Human Rights. *Journal of Contemporary Urban Affairs*, 3(2), 173-183.
- Santos Junior, O. A. D. (2014). Urban common space, heterotopia and the right to the city: reflections on the ideas of Henri Lefebvre and David Harvey. *Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 6(2), 146-157.
- Susanto, V, dan Ekomadyo, A.S. (2020). Developing Open-Air Sports Facilities to Enhance Socio-Family Relations, Study Case: Ice Rink Design in Cimanggis. 3rd *Science and Technology Research Symposium*. Unisba, 24 November 2020.
- Tixier, Nicolas et al. Bogotá : case study :research 2009-2010. [Research Report] 76, Cresson; Rafael Vinoly Architects 2010, pp.251.hal-00993838
- The European Urban Charter (1992). The European Declaration of Urban Rights. <https://rm.coe.int/urban-charter-ii-manifesto-for-a-new-urbanity-publication-a5-58-pages-168095e1d5>
- United Nations (1948). Universal Declarations of Human Rights. <https://www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/>
- World Charter for the Right to the City (2005). <http://www.righttothecityplatform.org.br/download/publicacoes/World%20Charter%20for%20the%20Right%20to%20the%20City.pdf>